

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aminuddin Ilmar. Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Predanamedia Group, 2014.

Bagir Manan. Hukum Administrasi Negara. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.ALD., Ph.D.,
Hukum Administrasi Indonesia “Konsep Dasar, Perkembangan, Dinamika,
Perbandingan dan Reformulasi, Bandung, PT Refika Aditama, 2025,

Keban, Yeremias T. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori
dan Isu). Yogyakarta: Gave Media, 2008.

Kristiawanto. Memahami Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Prenada, 2022.

Lukman Hakim. Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah. Malang:
Setara Press, 2012.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2011.

Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka,
2015.

Roeslan Saleh. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2004.

Stroink, F.A.M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Tjandra, W. Riawan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

B. Jurnal Ilmiah

Bunga, M. "Pembentukan Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Al-Ishlah Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(2), 2017. <https://doi.org/10.33096/aijih.v20i2.8>.

Djabu, N. "Implementasi Otonomi Khusus Kabupaten Nabire dalam Pengelolaan Keuangan." *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(4), 2023. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i4.691>.

Suyadi, A. & Sofi'i, I. "Progresifitas Peran Organ Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik." *Pamulang Law Review*, 5(1), 2022. <https://doi.org/10.32493/palrev.v5i1.23612>.

Wijayanto, R., Dewi, S., & Iswahyudi, G. "Pemerintahan Desa dalam Karakteristik Otonomi Desa di Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 2022. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1866>.

C. Tesis

Haryadi, Robby. Pengaturan Kewenangan Lurah untuk Menerbitkan dan Membatalkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dalam

Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia. Tesis, Magister Hukum, Universitas Jambi, 2021.

Indah Sari. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak atas Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan. Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, 2022.

Tobing, Henry Parulian. Analisis Implementasi Program Dana Kelurahan dalam Rangka Pelayanan Publik dan Pembangunan di Kelurahan pada Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Tesis, Magister Manajemen, Universitas HKBP Nommensen, 2020.

D. Disertasi

Rusdianto, S. Prinsip Kesatuan Hukum Nasional dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara. Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

